



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086  
Website : [www.fraksi.pks.id](http://www.fraksi.pks.id)



**PENDAPAT MINI  
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Disampaikan Oleh : Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si.  
Nomor Anggota : A-436

***Bismillahirrahmanirrahim***

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Yang Kami Hormati,  
Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI,  
Saudara Menteri Keuangan beserta jajaran,  
serta Hadirin yang berbahagia.

Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas curahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Hasil Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. Seraya kita memohon kiranya diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi NKRI dan mewujudkan Kemakmuran Rakyat sebagaimana Amanat UUD NRI 1945. Kita juga berdo'a agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Teruntuk para tenaga kesehatan yang berjuang, semoga jasa pengorbanan mereka mendapat ganjaran terbaik dari Allah SWT.

Selanjutnya, dalam menyikapi hasil pembicaraan terkait Rancangan Undang-undang Tentang Pertanggung-jawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Fraksi PKS memberikan beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Secara umum, Fraksi PKS berpendapat bahwa kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2019 masih kurang memuaskan, sehingga berdampak tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Fraksi PKS menilai kegagalan pemerintah mencapai target-target RPJMN 2015-2019 telah menjadi catatan buruk dan menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah. Target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah pada RPJMN 2015-2019 rata-rata 7 persen per tahun. Pemerintah hanya mampu mencapai pertumbuhan rata-rata 5 persen per tahun. Pendapatan per kapita di targetkan naik rata-rata 12 persen per tahun dan pada 2019 menjadi Rp72,43 juta per orang per tahun. Sampai akhir 2019, realisasi pendapatan per kapita hanya Rp59,1 juta, dengan pertumbuhan hanya 7 persen per tahun. Dengan demikian, pemerintah telah gagal mencapai target untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Fraksi PKS berpendapat bahwa dari tujuh asumsi dasar ekonomi makro tahun 2019, hanya dua asumsi yang mampu dicapai pemerintah yaitu inflasi dan nilai tukar Rupiah Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen dan hanya terealisasi 5,02 persen. Target suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,3 persen; terealisasi 5,62 persen. Lifting minyak dan lifting gas masing-masing dipatok 775 ribu barrel per hari dan 1.250 rbhsm. Akhir 2019, keduanya teralisasi dibawah target (746 ribu barrel dan 1.057 rbhsm).
3. Fraksi PKS menilai kegagalan pemerintah mencapai target penurunan persentase penduduk miskin disebabkan buruknya kualitas pertumbuhan ekonomi. Pada RPJMN 2015-2019, target persentase penduduk miskin turun menjadi 5-6 persen. Selama periode tersebut, jumlah penduduk miskin hanya turun 588 ribu dari 28,51 juta (2015:Agustus) menjadi 24,79 juta (2019:Agustus). Secara persentase, penurunan jumlah penduduk miskin hanya 1,91 persen dari 11,13 persen (2015:Agustus) menjadi 9,22 persen (2019: Agustus). Pada September 2019, angka kemiskinan di

Indonesia masih tinggi mencapai 9,22 persen. Angka kemiskinan di perdesaan mencapai 12,6 persen dan di perkotaan 6,56 persen. Angka kemiskinan menurut pulau pun cukup mengkhawatirkan. Hanya Jawa (8,29 persen) dan Kalimantan (5,81 persen) yang memiliki angka kemiskinan di bawah nasional. Di Sumatera, angka kemiskinan mencapai 9,82 persen; Bali dan Nusa Tenggara 13,36 persen; Sulawesi 10,07 persen; Maluku dan Papua 20,39 persen. Kemiskinan di perdesaan cukup tinggi. Misalnya, di Maluku dan Papua, kemiskinan di perdesaan mencapai 28,28 persen; sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 17,5 persen.

4. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah gagal mencapai target gini ratio pada RPJMN 2015-2019. Pada 2019 ditargetkan gini ratio turun menjadi 0,36 dari posisi 0,4 (2015). Realisasi menunjukkan Hingga Maret 2019, gini ratio masih tinggi mencapai 0,38; sedangkan pada 2015: Maret mencapai 0,402. Gini rasio di perkotaan mencapai 0,391 dan di perdesaan 0,315. Lonjakan gini ratio menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi bias ke golongan atas. Menurut data BPS, pada Agustus 2019, sebanyak 8 provinsi memiliki gini ratio di atas nasional yaitu DKI (0,391); Jawa Barat (0,398); DIY (0,428); Sulawesi Tenggara (0,391); Sulawesi Selatan (0,393); Gorontalo (0,41); Papua Barat (0,381) dan Papua (0,391).
5. Fraksi PKS berpendapat inflasi bahan pangan (*volatile food inflation*) yang melambung hingga 4,3 persen, menyebabkan ekonomi rakyat semakin sulit. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tahun 2019 adalah cabai merah, bawang merah, ikan segar, bawang putih, dan cabai rawit. Inflasi bahan pangan lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah harian buruh tani, hanya 3,19 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi rumah tangga menengah ke bawah terus tergerus karena kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Nilai tukar petani (NTP) juga tidak bergerak signifikan. Pada 2015, NTP hanya 102,83; pada 2016 turun menjadi 101,49; sementara itu 2019 hanya 104,46. Utang subsidi pupuk oleh pemerintah menjadi beban yang harus segera dilunasi. Kelangkaan pupuk merugikan petani.
6. Fraksi PKS berpendapat peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2019 yang berada pada level 85 dari 180 negara masih jauh dari menggembirakan. Fraksi

PKS mendesak pemerintah untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi di Indonesia karena berdampak signifikan terhadap iklim investasi dan perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, sebagai pembanding Malaysia berada di peringkat 51. Fraksi PKS mendorong upaya perbaikan yang jauh lebih serius untuk kebaikan negara dan bangsa.

7. Fraksi berpendapat bahwa APBN 2019 menjadi puncak kegagalan Pemerintah dalam mencapai target *tax ratio* sebagaimana yang dicanangkan pada RPJMN 2015-2019. Pemerintah selalu gagal mencapai target setiap tahunnya, dimana terdapat selisih lebih dari 5 persen antara target RPJMN dan realisasi *tax ratio*. Pemerintah belum mampu mendorong peningkatan *tax ratio* Indonesia yang bahkan selama lima tahun ini mengalami penurunan, dari 10,85 persen (2014) menjadi hanya 9,76 persen (2019). Hal ini tentu menjadi catatan buruk selama lima periode APBN terakhir yang perlu dievaluasi secara tuntas. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk dapat mendorong kinerja, terutama pada RPMJN 2020-2024 Pemerintah sudah menerapkan target *tax ratio* yang dapat mencapai 12,7 persen. Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* Indonesia dengan memperluas basis perpajakan, terutama kepada Wajib Pajak (WP) yang berada di luar negeri dan memiliki aktifitas ekonomi di dalam negeri, mendorong kepatuhan wajib pajak dan kepastian hukum perpajakan. Fraksi PKS berpendapat, langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan efisiensi mekanisme restitusi dan audit PPN yang belum optimal untuk mendorong penerimaan PPN, serta mendorong partisipasi publik dalam hal pengawasan. Lebih lanjut Pemerintah perlu melakukan eksplorasi pada potensi-potensi penerimaan perpajakan baru, seperti PPN pada layanan digital.
8. Fraksi PKS menilai realisasi pendapatan negara yang hanya sebesar 90,6 persen dari target, diperburuk realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 86,55 persen. Rendahnya realisasi penerimaan perpajakan menyebabkan defisit semakin melebar, sehingga mendorong Pemerintah menerbitkan utang publik baru, yang pada akhirnya menambah beban bunga pada APBN ke depannya. Fraksi PKS memandang Pemerintah tidak optimal mendorong PNBPN. Hal ini terlihat dari rasio PNBPN terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 3,8 persen (2014) menjadi hanya sekitar 2,5 persen (2019). Pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perbaikan administrasi

dan birokrasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan PNBPNasional. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan BUMN, sehingga dapat mendorong penerimaan PNBPNasional.

9. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah perlu memperbaiki kualitas belanja yang tidak hanya fokus pada *output*, namun juga terhadap *outcome*, dan *result based* untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas belanja yang tepat sasaran pada sektor kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, subsidi, kemudahan mendapatkan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan serta pekerja sektor lainnya. Sehingga produktifitas, indeks daya saing, dan daya beli masyarakat semakin meningkat. Pemerintah perlu meningkatkan peran dan kualitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran adalah hal yang sangat dibutuhkan. Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada sektor yang lebih produktif.
  
10. Fraksi PKS berpendapat bahwa pemerintah perlu memperbaiki kualitas belanja seperti ICOR dan Elastisitas Belanja Negara terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu melakukan efisiensi dengan penajaman belanja barang dan meningkatkan belanja modal secara gradual. Belanja modal sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan peran belanja negara, sehingga dapat menciptakan *multiplier effect* yang besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fraksi PKS juga berpendapat bahwa kebijakan belanja subsidi harus terus diperbaiki agar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan rakyat secara mendasar. Kebijakan rasionalisasi anggaran subsidi jangan sampai mengorbankan daya beli masyarakat kecil, serta pedagang kecil yang memerlukan subsidi. Kebijakan harga energi dan kaitannya dengan subsidi energi termasuk program bansos perlu dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak buruk pada daya beli masyarakat.
  
11. Fraksi PKS berpendapat bahwa telah terjadi penurunan atas realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) TA 2019. Fraksi PKS juga mendesak pemerintah

untuk memastikan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdampak pada kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup rakyat di daerah. Alokasi dana yang semakin besar harus didukung oleh kebijakan untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah unggulan dan potensial. Baik berbasis pertanian, maritim, pariwisata, maupun produk unggulan lainnya.

12. Fraksi PKS menyoroti besarnya utang pemerintah pusat dan utang BUMN yang membebani APBN 2019. Risiko bisnis yang ditanggung BUMN akan berimbas terhadap APBN, seperti kewajiban *contingency* maupun alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN). Besaran PMN kepada BUMN dinilai belum sejalan dengan perbaikan kinerja perseroan. Lonjakan signifikan realisasi PMN kepada BUMN pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp17,8 triliun dari Rp3,6 triliun pada 2018 (meningkat 394,44 persen) merupakan fokus tersendiri bagi Fraksi PKS. BUMN infrastruktur menjadi salah satu yang memiliki tekanan terberat, akibat dari kurang memadainya pengkajian ulang studi kelayakan atau *feasibility study* dari tiap proyek yang diinisiasi pemerintah, ini berdampak pada tingginya risiko bisnis yang ditanggung BUMN infrastruktur, pada akhirnya terjadi penumpukan utang yang menjadi beban tanggungan APBN.
  
13. Fraksi PKS berpendapat bahwa Pemerintah tidak mampu mengendalikan defisit anggaran yang setiap tahunnya meningkat. Defisit anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp348,65 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan target defisit dalam APBN sebesar Rp296 triliun. Meskipun defisit anggaran 2019 telah ditetapkan lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya (Rp269,44 triliun), namun demikian melebarnya defisit pada 2019 tidak dapat dihalau oleh Pemerintah. Rendahnya kinerja pendapatan menjadi alasan tingginya realisasi defisit yang mencapai 117,79 persen dari anggaran. Nilai tersebut menggambarkan adanya penurunan kinerja Pemerintah dibanding 2018. Tercatat bahwa 2018 defisit dibukukan 1,84 persen dari PDB, sedangkan pada 2019 defisit mencapai 2,2 persen dari PDB. Selain itu Fraksi PKS juga berpendapat pemerintah gagal mencapai defisit keseimbangan primer yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019 sehingga turun menjadi 0,22 persen dari PDB pada 2019. Rata-rata target defisit keseimbangan primer per tahun sepanjang 2015-2019 mencapai 0,66 persen dari PDB. Sedangkan, realisasi defisit keseimbangan primer pada 2019 mencapai 0,45 persen PDB. Rata-rata defisit keseimbangan primer

pada 2015-2019 mencapai 0,74 persen dari PDB. Fraksi PKS menghitung bahwa total defisit keseimbangan primer mencapai Rp477 triliun pada 2015-2019. Secara rata-rata, defisit keseimbangan primer tumbuh rata-rata 97 persen per tahun.

14. Terkait realisasi Utang 2019 yang melebihi angka pagu anggaran sebesar Rp78,29 triliun atau melebar 21,79 persen, Fraksi PKS berpendapat bahwa hal tersebut merupakan ketidakberhasilan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal. Pelebaran defisit anggaran karena Pemerintah tidak mampu mencapai target penerimaan sehingga diperlukan tambahan sumber dana untuk menutupi beban belanja negara. Tingginya realisasi utang memberikan konsekuensi makin beratnya beban APBN pada tahun-tahun mendatang, artinya bahwa porsi pembayaran cicilan pokok utang dan bunga pada belanja negara akan semakin meningkat. Di samping itu, meningkatnya jumlah utang yang tidak terkendali dalam mengancam keberlangsungan dan ketahanan fiskal.
15. Fraksi PKS berpendapat perbaikan proses perencanaan dan realisasi program yang dilakukan oleh Pemerintah belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pada tahun 2014, SiLPA mencapai Rp19 triliun dan meningkat menjadi Rp24,61 triliun pada tahun 2015. Pada tahun 2018 SiLPA mencapai Rp36,2 triliun, dan 2019 dibukukan sebesar Rp53,39 triliun yang menjadi nilai tertinggi selama 5 tahun terakhir. Total pembiayaan yang dilakukan Pemerintah untuk menutup defisit sebesar Rp402,05 triliun atau 135,83 dari defisit dalam APBN 2019. Kondisi tersebut ironis dengan lonjakan utang yang terus meningkat setiap tahunnya yang artinya bahwa Pemerintah tidak mampu mengoptimalkan pembiayaan melalui utang yang memiliki dampak beban bunga pada anggaran tahun-tahun berikutnya.
16. Fraksi PKS mendesak Pemerintah memberikan pembinaan, pendampingan dan menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK RI dengan serius, komprehensif dan penuh integritas agar tidak terjadi temuan-temuan yang berulang. Termasuk juga dengan dua Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), satu LKKL yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/*Disclaimer*).

17. Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan penyajian aset Pemerintah dengan melakukan penertiban aset yang meliputi pemanfaatan dan legalitas aset tetap pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga. Fraksi PKS mendukung pemerintah untuk dapat meningkatkan kapasitas modal insani di Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah berupa pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual (*accrual basis*) yang berkualitas. Fraksi PKS kembali mendesak agar Pemerintah dapat mengupayakan LKPP Konsolidasi yang mampu mencakup seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga LKPP mencerminkan sebagai satu kesatuan entitas yaitu NKRI. Hal ini juga terkait dengan pelaksanaan Transfer Daerah dan Dana Desa yang perlu terkonsolidasi. Beserta dengan Laporan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan beserta utang-utangnya BUMN dapat melalui *off balance sheet disclosure*.

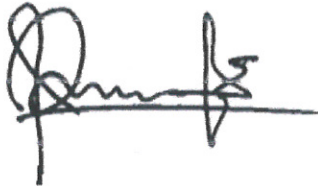
Demikian pandangan Fraksi PKS DPR-RI, dengan mengucapkan *Bismillahir-rahmannirrahim*, **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan *minderheid nota* (menerima dengan catatan)** hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggung-jawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 dalam rangka pembicaraan Tingkat I, untuk dilanjutkan dalam tahapan pembahasan selanjutnya. Maka, atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu dalam mendengarkan pandangan Fraksi PKS, kami ucapkan terima kasih.

**Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, billahi taufiq wal hidayah,  
Wassalaamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, 19 Muharam 1442 H  
07 September 2020 M

**PIMPINAN FRAKSI  
PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua



**DR. H. Jazuli Juwaini, M.A.**  
No. Anggota: A-449

Sekretaris



**Hj. Ledia Hanifa A. S.Si., M.PSi.T.**  
No. Anggota: A-427